

**EFEKTIFITAS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGKOORDINASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DI DESA BALOHANG KECAMATAN LEDE
KABUPATEN PULAU TALIABU**

Oleh :

Ade Putra Ode Amane

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: putrohade@gmail.com/ adeputra@unismuhluwuk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada selama tiga (3) bulan yakni dari September sampai dengan November 2017. Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas kewenangan kepala desa dan pembangunan partisipatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan kuisisioner atau angket. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Balohang yang berjumlah 558 Orang. Karena jumlah populasi yang cukup banyak maka penulis menggunakan tehnik Purposive Sampling dengan mengambil sampel berjumlah 50 orang.

Tehnik penentuan sampel adalah menggunakan tehnik purposive sampling. Tehnik pembobotan yang digunakan adalah metode skor, sedangkan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis diskriptif kualitatif yakni dengan bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan obyek penelitian yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kewenangan kepala desa telah dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dapat berjalan dengan sangat baik dengan hasil presentase 80.56 %

Kata Kunci : Kewenangan, Pembangunan Partisipatif.

Abstract

This research was conducted in three (3) months ie from September to November 2017. This study focuses on the effectiveness of the authority of the village chief and participatory development. The data collection techniques used in this research is observation, documentation and questionnaires or questionnaire. Data used in this study are primary data and secondary data. The population in this study is the whole community and village government, amounting to 558 Orang Balohang. Because the population is pretty much the authors using purposive sampling technique by taking a sample of 50 people.

The sampling technique is using purposive sampling technique. Weighting technique is the method of scoring, while data analysis techniques used in the study is a qualitative descriptive analysis that is the shape that describes the research, explained the research object under study. The results showed that the effectiveness of the authority of the village chief has been carried out properly so that the implementation of a participatory development can run very well with a percentage of 80.56% results

Keywords: Authority, Participatory Development.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap penguatan peran masyarakat dan penguatan semangat tata pemerintahan yang baik (Good governance). Penguatan peran masyarakat bukanlah sekedar memberikan kesempatan bagi “peran serta masyarakat”, akan tetapi adalah bagaimana menempatkan masyarakat secara bertahap terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Sedangkan penguatan semangat good governance menuntut semua pelaku pembangunan untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, meningkatkan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Kelahiran Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pemerintahan Desa) memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman desa.

Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan terutama di tingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (Top down), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan

dasar dari pembangunan nasional dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif merupakan arus utama pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan dukungan atau keikutsertaan masyarakat setempat. Pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak. Artinya masyarakat bukan sekedar objek melainkan melibatkan masyarakat secara langsung merupakan bagian pengkoordinasian antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat.

Kewenangan kepala desa terhadap pengkoordinasian pembangunan desa secara partisipatif di Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, apalagi desa yang belum mencapai satu periode pemekaran ini tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sebagai unsur pelaksana pada tingkat desa, kepala desa dituntut untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu. Waktu yang dibutuhkan sejak pelaksanaan observasi sampai proses kegiatan penyelesaian penelitian dengan membutuhkan waktu kurang lebih selama tiga (3) bulan, dari September sampai dengan November 2017.

Menurut Sugiyono (2002), menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Balohang yang berjumlah 558 jiwa. Sampel adalah suatu himpunan atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah merupakan teknik

pengambilan sampel, dimana peneliti menggunakan Purposive Sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiono 2006 : 95).

Dalam penelitian ini proses untuk mengklasifikasi data yang telah terkumpul secara lebih rinci, sistematis, menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur setiap indikator adalah dengan menggunakan Skala Likert, dengan memberikan skor pada setiap kategori, sebagai sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2001:108).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (X) dalam hal ini adalah efektifitas kewenangan kepala Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu dan Variabel bebas (Y) dalam hal ini adalah pembangunan desa secara partisipatif di Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu itu sendiri yang nantinya akan dijabarkan sesuai jawaban kuesioner dari para responden yang berjumlah 50 orang,

Tabel 1. Kewenangan Kepala Desa Mengordinasikan pembangunan partisipatif.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	fxb	Prosentase (%)
1.	Sangat	5	17	85	34
2.	Setuju	4	28	112	56
3.	Ragu- ragu	3	5	15	10
4.	Tidak setuju	2	-	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	212	100
Skor		$212:250 \times 100\% = 84,8$			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengolahan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban bahwa Kewenangan Kepala Desa selalu mengordinasikan pembangunan partisipatif dengan persentase jawaban responden dengan skor 84,8% atau masuk pada kriteria sangat baik.

Tabel 2. Kewenangan Kepala Desa yang diambil selalu melibatkan bawahan.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat selalu	5	16	80	32
2.	Selalu	4	27	108	54
3.	Ragu- ragu	3	5	15	10
4.	Tidak selalu	2	2	4	4
5	Sangat Tidak selalu	1	-	-	-
Jumlah			50	207	100
Skor		$207:250 \times 100\% = 82,8$			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengolahan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban

bahwa Kewenangan Kepala Desa yang diambil selalu melibatkan bawahan dengan persentase jawaban responden 82,8 % pada kriteria sangat baik.

Tabel 3. Efektifitas kewenangan kepala desa selalu disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat selalu	5	16	80	32
2.	selalu	4	22	88	44
3.	Ragu- ragu	3	7	21	14
4.	Tidak selalu	2	5	10	10
5	Sangat Tidak selalu	1	-	-	-
Jumlah			50	199	100
Skor		199 : 250x100% = 79,6			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban bahwa efektifitas kewenangan kepala desa selalu disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan dengan persentase jawaban responden 79,6 % masuk pada criteria sangat baik.

Tabel 4. Kewenangan kepala desa selalu Mengontrol dan mengevaluasi jalanya pembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat selalu	5	11	55	22
2.	selalu	4	23	92	46
3.	Ragu- ragu	3	8	24	16
4.	Tidak selalu	2	8	16	16
5	Sangat Tidak selalu	1	-	-	-
Jumlah			50	187	100
Skor		187 : 250:100% = 74,8			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban Kewenangan kepala desa selalu Mengontrol dan mengevaluasi jalanya pembangunan dengan persentase jawaban responden 74,8 % masuk pada kriteria sangat baik.

Tabel 5. Kepala desa selalu Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	15	75	30
2.	Setuju	4	26	104	52
3.	Ragu- ragu	3	5	15	10
4.	Tidak setuju	2	4	8	8
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	202	100
Skor		$202 : 250 \times 100\% = 80,8$			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengolahan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban Kepala desa selalu Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berhubungan dengan pembangunan desa dengan persentase jawaban responden 80,8 % masuk pada criteria sangat baik.

Tabel 6. Kepala desa selalu Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	12	60	24
2.	Setuju	4	30	120	60
3.	Ragu- ragu	3	8	24	16
4.	Tidak setuju	2	-	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	204	100
Skor		204: 250x100% = 81,8			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengolahan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban bahwa Kepala desa selalu Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan persentase jawaban responden 81,8 % masuk pada kriteria sangat baik.

Tabel 7. Kepala desa Menggerakkan masyarakat secara partisipasi bukan mobilisasi.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	16	80	32
2.	Setuju	4	22	88	44
3.	Ragu- ragu	3	7	21	14
4.	Tidak setuju	2	5	10	10
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	199	100
Skor		199 : 250x100% = 47,6			
Kriteria		Kurang Baik			

Sumber data: hasil pengolahan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban yang benar bahwa Kepala desa Menggerakkan masyarakat secara

partisipasi bukan mobilisasi dengan persentase responden 47,6 atau masuk pada kriteria kurang baik.

Tabel 8. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	11	55	22
2.	Setuju	4	23	92	46
3.	Ragu- ragu	3	8	24	16
4.	Tidak setuju	2	8	16	16
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	187	100
Skor		187 : 250x100% = 74,8			
Kriteria		Baik			

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban yang benar bahwa Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif dengan persentase responden 74,8 atau masuk pada kriteria baik.

Tabel 9. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	15	75	30
2.	Setuju	4	26	104	52
3.	Ragu- ragu	3	5	15	10
4.	Tidak setuju	2	4	8	8
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	202	100
Skor		202 : 250 x100%= 80,8			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban

bahwa Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa) dengan persentase jawaban responden 80,8 atau masuk pada kriteria Sangat baik.

Tabel 10. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa.

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	f x b	Prosentase (%)
1.	Sangat setuju	5	12	60	24
2.	Setuju	4	30	120	60
3.	Ragu- ragu	3	8	24	16
4.	Tidak setuju	2	-	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			50	204	100
Skor		204 : 250x100% = 81,6			
Kriteria		Sangat Baik			

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan responden memberikan jawaban bahwa Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa dengan persentase jawaban responden 81,6 atau masuk pada kriteria Sangat baik.

Tabel 11. Rekapitulasi jawaban responden variabel (X) tentang Efektivitas Kewenangan Kepala Desa.

Nomor pertanyaan	Persentase (%)	Kategori
1	84,8	Sangat Baik
2	82,8	Sangat Baik
3	79,6	Sangat Baik
4	74,8	Sangat Baik
5	80,8	Sangat Baik
Jumlah	402,8	
Rata-rata	402,8 : 5 = 80,56	Sangat Baik

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Jika dilihat dari hasil rekapitulasi yang ada (X), Efektivitas Kewenangan Kepala Desa Balohang berjalan sangat baik hal ini

ditunjukkan pada tabel diatas dengan nilai rata-rata 80,56% atau dapat dikatakan sangat baik.

Tabel 12. Rekapitulasi jawaban responden Variabel (Y)
Pengkoordinasian Pembangunan Partisipatif.

Nomor Pertanyaan	Persentase (%)	Kategori
1	81,8	Sangat Baik
2	47,6	Kurang Baik
3	74,8	Sangat Baik
4	80,8	Sangat Baik
5	81,6	Sangat Baik
Jumlah	366,6	
Rata-rata	$366,6:5=73,32$	Baik

Sumber data: hasil pengelolaan data tahun 2017

Jika dilihat dari hasil rekapitulasi yang ada (Y) Pengkoordinasian Pembangunan Partisipatif di desa Balohang berjalan sangat baik hal ini ditunjukkan pada tabel diatas dengan nilai rata-rata 73,32 atau dapat dikatakan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Efektivitas Kewenangan Kepala Desa dengan nilai rata-rata 80,56% atau dapat dikatakan sangat baik dan Pengkoordinasian Pembangunan Desa Secara Partisipatif dengan rata-rata 73,32 atau dapat dikatakan baik.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas dapat penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kewenangan kepala desa merupakan bagian hak priogatif berdasarkan potensi dan amanat Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang perlu dipertahankan dan dilaksanakan berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat desa setempat sehingga pelaksanaan wewenang dapat terimplementasi berdasarkan harapan masyarakat banyak.

2. Harmonisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat Balohang kecamatan Lede kabupaten Pulau Taliabu dapat terjalin secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- B.N Marbun SH 2010. (1988:36) *ibid*
- Baratha, I Nyoman, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982).
- Boutman, *Mekanisme Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta, Kompas, 1982).
- Departemen Dalam Negeri, 2002. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999*.
- Djayandiningrat, 1996. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, PT, Masagung Jakarta
- Djohermansyah Djohan, *Probelmatika Pemerintahan Dan Politik Lokal*, cet 1(Jakarta, Bumiaksara, 1990)
- Josef Riwan Kahodalam, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Moenir, AS.1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, M.Ngalim Purwanto, *Admintrasi dan Supervise Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Moh.Djufri R Diko, S.Sos, MM. DKK, 2014. *Pedoman Penulisan Proposal, Hasil Penelitian dan Skripsi*, Edisi Revisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Muhammadiyah Luwuk
- Muhammad labolo,op.cit.
- Nazir, Moh, 1999. *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, Jakarta
- Poerwadarmunta,W.J.S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- S.Pamudji, Teori System dan Penerapannya Dalam Manjemen, Jakarta: Ichtiar Baru, 1981.
- Samodra wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan*; Konsep Dan Kasus, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yogya, 1991
- Sugiyono, 2002. Metodologi Penelitian adminstratif, CV, alfabeta, Bandung
- Syaukani, Affangaffar, dan Ryassrasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta: Pustaka Pelajar, cet.7, 2007.
- Unang sunarjo R.H 1983. Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintah Kerajaan Ciribon 1479-1809. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Dokumen-dokumen
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pemerintahan Desa)
- Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentangp pemerintah desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Desa Nomor 4 Tahun 2014